

SAMBANG WARGA DI DESA BOWAN, BUPATI KLATEN MENYERAHKAN BANTUAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS



Sumber Gambar:

https://koranbernas.id/uploads/images/202309/image_870x_6509a92e214e2.jpg

Isi Berita:

KORANBERNAS.ID, KLATEN -- Bupati Klaten Sri Mulyani pada acara sambang warga di Kantor Desa Bowan Kecamatan Delanggu, Selasa (19/9/2023), menyerahkan bantuan jaminan hidup (jadup) kepada Rizki Nur Andrian, warga penyandang disabilitas. Bantuan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Klaten sebesar Rp 1 juta tersebut diterima Nur Hayati, orang tua dari Rizki.

"Semoga bermanfaat. Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk berobat dan lekas sembuh," kata bupati pada acara yang dihadiri Sekda Klaten, Asisten I, Kepala OPD, Camat Delanggu dan Kepala Desa se Kecamatan Delanggu, Kepala Puskesmas Delanggu, karang taruna dan relawan.

Nur Hayati menceritakan Rizki mengalami kondisi fisik tidak bisa berjalan dan tidak sesuai perkembangan usianya.

"Sudah lama sejak lahir dari 1997, jadi sudah 26 tahun kondisinya seperti ini. Sudah berobat ke mana-mana tidak ada perkembangan, namun masih bisa berkomunikasi," jelasnya.

Nur menambahkan, putera sulungnya itu lahir prematur saat usia kandungan tujuh bulan. Dia mengaku rela tidak bekerja demi merawat sang anak sehingga praktis kehidupan keluarga bertumpu pada sang ayah yang bekerja serabutan.

Dia berharap ada keajaiban sehingga Rizki bisa pulih dan beraktivitas seperti teman-temannya seusianya. "Terima kasih Ibu Bupati atas bantuannya, saya senang diberi bantuan ini," ujarnya.

Acara sambang warga juga dimanfaatkan bupati untuk menyerahkan bantuan paket sembako dari PDAM, bantuan untuk anak yatim dan tidak mampu dari Bank Klaten dan Baznas, jambanisasi, bantuan kursi roda serta bantuan biokorfensi kepada gapoktan. (*)

Sumber Berita:

1. <https://koranbernas.id/sambang-warga-di-desa-bowan-bupati-klaten-menyerahkan-bantuan-kepada-penyandang-disabilitas>, “Sambang Warga di Desa Bowan, Bupati Klaten Menyerahkan Bantuan kepada Penyandang Disabilitas”, tanggal 19 September 2023.
2. <https://klatenkab.go.id/sambang-warga-desa-bowan-rizki-penyandang-disabilitas-terima-bantuan-jaminan-hidup/>, “Sambang Warga Desa Bowan : Rizki Penyandang Disabilitas Terima Bantuan Jaminan Hidup”, tanggal 19 September 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi